

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	7
BAB IV	8
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	8
BAB V	9
PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 tahun 2021 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 2021. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Ringkasan Perubahan APBD

Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2022

kode rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	8.006.728.318	9.266.557.069	1.249.828.753	15,61
51	BELANJA OPERASI	7.882.775.318	8.625.795.669	743.020.253	9,43
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.435.946.416	6.086.166.269	650.219.853	11,96
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.082.000.000	1.182.000.000	100.000.000	9,24
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.488.761.900	1.988.360.800	499.608.000	33,56

Sedangkan, Laporan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Damkar menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2022

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.256.557.069	8.888.633.674	96,03
5	BELANJA DAERAH	9.256.557.069	8.888.633.674	96,03
51	BELANJA OPERASI	8.625.795.569	8.266.746.224	95,84
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.086.166.269	5.827.886.846	95,76
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.302.199.979	5.089.580.020	96,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.302.199.979	5.089.580.020	96,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.999.140	285.687.550	94,29
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.999.140	125.061.050	97,70
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	160.626.500	91,79
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.733.150	81.794.150	95,41
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	6.999.950	6.969.000	99,84

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.940.000	18.240.250	96,31
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.793.900	7.162.000	73,13
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	2.892.500	96,42
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.999.300	46.510.400	98,96
1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.224.000	232.849.255	90,52
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	61.718.364	88,17
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.224.000	171.130.891	91,40
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.010.000	137.975.871	99,98
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.510.000	72.489.740	99,97
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.500.000	65.486.131	99,98
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman	1.182.000.000	1.086.922.320	91,96

	dan Ketertiban Umum			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.182.000.000	1.086.922.320	91,96
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patrol, pengamanan, dan Pengawasan	92.000.000	88.196.320	95,86
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	976.504.000	893.273.000	91,48
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	113.496.000	105.454.000	92,91
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.933.390.800	1.973.824.508	99,27
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.822.690.800	1.816.151.708	99,31

1.05.04.2.01.02	Pemadamen dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	148.708.800	148.237.293	99,68
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,	106.160.000	105.841.265	99,70
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	560.682.200	553.353.150	98,89
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.007.140.000	1.002.720.000	99,56
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	165.700.800	163.672.800	98,78
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	165.700.000	163.672.800	98,78

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terrealisasi sebesar Rp 8.888.633.674,- atau 96,03% dari target anggaran sebesar Rp 9.256.557.069,-.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA

Satpol PP dan Damkar tidak mengelola pendapatan daerah.

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi meliputi :

1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.093.405.020,- yaitu 95,99% dari anggaran sebesar Rp 5.306.049.979,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.449.979	3.129.692.831
Tambahan Penghasilan ASN	2.050.750.000	1.959.887.189
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.850.000	3.825.000
Total	5.306.049.979	5.093.405.020

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa, Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.173.341.204,- yaitu 95,59 % dari anggaran sebesar Rp 3.319.745.590,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	595.660.290	581.166.944
Belanja Jasa	2.536.886.000	2.413.197.855
Belanja Pemeliharaan	132.510.000	132.466.005
Belanja Perjalanan Dinas	54.689.300	46.510.400
TOTAL	3.319.745.590	3.173.341.204

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp. 621.887.450 ,- atau 98,59% dari anggaran sebesar Rp.630.761.500 ,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal	2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	630.761.500	621.887.450
TOTAL	630.761.500	621.887.450

3.1.3 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Setpol PP dan Damkar sebesar Rp. 0,-

3.1.4 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.151.620.899,16,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
8	BEBAN DAERAH	9.154.491.899,16
81	BEBAN OPERASI	9.057.475.399,16
8101	Beban Pegawai	5.079.736.698,00
8102	Beban Barang dan Jasa	3.177.014.674,00

8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	800.724.027,16
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	774.286.062,16
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.500.840,00
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.481.875,00
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	97.016.500,00
	Jumlah Beban	9.154.491.899,16

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.079.736.698,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	2.333.861.680
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	237.020.291
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	125.810.000
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.865.000
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	157.368.680
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.097.855
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	30.151
810101090001	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	164.619.194
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	864.682.753
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.081.536.114
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.825.000
JUMLAH		5.079.736.698

2. Beban Barang dan Jasa

a. Beban barang sebesar Rp 581.034.444,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.639.744,00
810201010009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.822.000,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.826.450,00
810201010013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.706.000,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.476.300,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.723.000,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.614.100,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.230.000,00
810201010028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.567.500,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.685.500,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.989.000,00
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.731.000,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	57.693.500,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.648.000,00
810201010063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.441.300,00
810201010064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	86.641.050,00
	JUMLAH	581.034.444

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa sebesar Rp 2.417.003.825,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020201	Beban Jasa Kantor	2.165.496.934,00
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	87.700.000,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	128.316.000,00
810202010011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	41.250.000,00
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	86.400.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administresi	1.680.000.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	64.700.000,00
810202010051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	960.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	15.000.385,00
810202010060	Beban Tagihan Air	9.082.100,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	38.375.849,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.712.600,00
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	81.815.891,00
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	73.542.301,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.677.150,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.596.440,00
8102020	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	25.075.000,00
810202040117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	18.850.000,00

810202040118	Beban Sewa Mebel	6.225.000,00
81020205	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	43.000.000,00
810202050009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00
810202050043	Beban Sewa Hotel	38.000.000,00
81020213	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	98.550.000,00
810202130001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	60.300.000,00
810202130002	Beban Sosialisasi	20.250.000,00
810202130003	Beban Bimbingan Teknis	18.000.000,00
81020216	Beban Barang Ekstrakomptabel	3.066.000,00
810202160001	Beban Barang Ekstrakomptabel	3.066.000,00
Jumlah		2.417.003.825

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp 132.466.005,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.466.005,00
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	132.466.005,00
Jumlah		132.466.005

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 46.510.400,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2022.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810204	Beban Perjalanan Dinas	46.510.400,00

810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	46.510.400,00
	JUMLAH	46.510.400,-.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp 800.724.027,16- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	774.286.062,16
81080101	Beban Penyusutan Alat Besar	305.826.796,52
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	264.373.928,57
81080103	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.310.930,00
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.338.998,20
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.416.800,00
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.045.808,00
81080108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	10.922.037,50
81080109	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	93.085.998,37
81080110	Beban Penyusutan Komputer	7.300.000,00
81080111	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	3.586.000,00
81080115	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	21.078.765,00
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		774.286.062,16
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.500.840,00
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.500.840,00
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		17.500.840,00
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.481.875,00
81080302	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.481.875,00

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		1.481.875,00
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
81080601	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
Jumlah Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud		7.455.250,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		800.724.027,16

3.1.5 Aset

Total aset Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.398.423.563,94 Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	282.500,00
13	ASET TETAP	2.383.230.563,94
15	ASET LAINNYA	14.910.500,00
JUMLAH ASSET		2.398.423.563,94

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset lancar milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2022. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2022 adalah Rp 282.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
---------------	--------	--------

1101	Kas setara kas	0,-
1112	Persediaan (Bahan Cetak)	282.500,-
JUMLAH ASET LANCAR		282.500,-

1) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2022. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 2.383.230.563,94 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	Tanah	0,-
1302	Peralatan dan Mesin	12.933.935.326,00
1303	Gedung dan Bangunan	875.042.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.275.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	301.461.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(11.786.482.762,05)
Jumlah		2.383.230.563,94

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2022 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2021 yaitu sebesar Rp 0,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2022
1		0
Jumlah		0

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 peralatan dan mesin sebesar Rp 12.933.935.326,- dalam Tahun Anggaran 2022. Seperti pada data berikut :

Uraian	Saldo Awal	+	-	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	11.994.858.528			11.994.858.528
Belanja Modal		621.692.450		12.616.550.978
Droping dari Dirpusip		4.230.000		12.620.780.978
Droping dari DPLU		366.286.798		12.987.067.776
Droping dari Bag. Umum		24.000.000		13.011.067.776
Reklas dari Belanja Modal 2022 ke barang ekstrakontabel			63.969.450	12.947.098.326
Mutasi Keluar			7.800.000	12.939.298.326
Penghapusan Aset			5.363.000	12.933.935.326

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130301	Bangunan Gedung	875.042.000,00	875.042.000,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130402	Bangunan Air	59.275.000,00	59.275.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp 301.461.000,- yaitu merupakan Aset Tetap Lainnya dan tidak terdapat perubahan dari saldo awal sampai dengan per 31 Desember 2022.

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130502	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan / Olahraga	301.461.000,00	301.461.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sebesar Rp (11.786.482.762,06) adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Rekapitulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2022

Kode Rekening	Aset	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir
130701	Peralatan dan Mesin	(10.403.284.005,40)	(11.349.470.694,56)
130702	Gedung dan Bangunan	(108.418.040,00)	(125.918.880,00)
130703	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.150.312,50)	(9.632.187,50)
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(301.461.000,00)	(301.461.000,00)
	Jumlah	(10.821.313.357,90)	(11.786.482.762,06)

2) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset lain-lain, terdapat perubahan pada aset lain-lain yaitu Berkurang sebesar Rp. 97.016.500,- sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1503	Aset Tidak Berwujud	29.821.000,00	29.821.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	29.821.000,00	29.821.000,00
1504	Aset Lain-lain	171.633.500,00	74.617.000,00

150401	Aset Lain-lain	171.633.500,00	74.617.000,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.455.250,00)	(14.910.500,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.455.250,00)	(14.910.500,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(74.550.500,00)	(74.617.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(74.550.500,00)	(74.617.000,00)
	JUMLAH	119.448.750,00	14.910.500,00

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp 301.804.926,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
210601	Utang Belanja Pegawai	157.327.000,00	143.658.678,00
210602	Utang Belanja Barjas	157.406.278,00	158.146.248,00
	JUMLAH	314.733.278,00	301.804.926,00

- Saldo Akhir utang belanja pegawai sebesar Rp. 143.658.678,- terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
210601020009	TPP berdasarkan Beban Kerja	143.658.678,00
	JUMLAH	143.658.678,00

- Saldo Akhir utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 158.146.248,-,- terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterliban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00

210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	140.000.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.250.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.235.611,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	678.600,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.782.037,00
	JUMLAH	158.146.248,00

- 3.1.7 Ekuitas Dana
 Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.096.618.637,94,-.

- 3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penylapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan; dan
 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2022 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2022, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 Satpol PP dan Damkar sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. EDY CAHYADI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 003